



Efisiensi Pangkas APBD Rp 250 Miliar

Pemkot-DPRD Sepakati Tiga Prioritas

YOGYAKARTA, Joglo Jogja - Efisiensi anggaran di tahun 2026 masih terjadi. Diperkirakan, efisiensi dari pemerintah pusat mencapai Rp 250 miliar. Akibatnya, APBD Kota Yogyakarta diperkirakan turun hanya Rp 1,8 triliun tahun depan. Dari total anggaran

tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dan DPRD telah sepakat. APBD 2026 akan memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan penanganan sampah. "Yang diefisienkan belanja modal, seperti membangun infrastruktur atau memperbaiki jalan. Beberapa kegiatan yang sifatnya belanja modal itu tidak akan direalisasikan dulu," ujar Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan, kemarin (4/10/2026). Wawan menjelaskan, efisiensi

dilakukan sebagai antisipasi kemungkinan berkurangnya dana transfer dari pusat sekitar Rp 250 miliar atau setara 21-26 persen dari total alokasi. Di APBD Kota Yogyakarta tahun 2026, lanjut Wawan, mencapai lebih dari Rp 2 triliun. Dari jumlah itu, belanja pegawai di Kota mencapai 41 persen. "Pendidikan tidak (terkena pengurangan) karena itu sudah wajib dialokasikan. Malah ada penambahan, termasuk kesehatan karena

ada paket wajib pemeriksaan gratis. Jadi, pendidikan dan kesehatan bisa memakan 47 persen sendiri," ujarnya. Anggaran pendidikan dan kesehatan, lanjut Wawan, tak akan tersentuh efisiensi. Karena termasuk *mandatory spending* atau belanja wajib yang dilindungi aturan. Wawan menegaskan, posisi fiskal Kota Yogyakarta masih relatif lebih kuat ketimbang kabupaten lain di DIY. Sebab, memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang

mendekati Rp 1 triliun. "Kalau kabupaten lain PAD-nya Rp 300 miliar sampai Rp 400 miliar, jadi beban belanja pegawainya lebih berat. Kami normalnya 30 persen. Kalau pembagiannya dikurangi karena transfer pusat turun, otomatis persentasenya naik, tapi bukan berarti belanja pegawainya bertambah," tutur dia. Secara nasional, alokasi dana TKD dalam rancangan anggaran tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 649,99 triliun. Itu turun

signifikan dari perkiraan realisasi tahun 2025 yang sebesar Rp 864 triliun atau dibandingkan alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun. Sebagai kompensasi, Kemenkeu memutuskan untuk menaikkan belanja program pemerintah pusat untuk daerah yang dikurikan langsung melalui kementerian/lembaga (K/L) hingga sekitar Rp 1.300 triliun, naik signifikan dari alokasi sebelumnya Rp 900 triliun. (*eri/amd/wa*)



DINA PEMKOT YOGYAKARTA
Wawan Harmawan
 Wakil Wali Kota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005